



**PENGARUH PENDAPATAN DAN MASA KERJA TERHADAP KINERJA
APARATUR NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI
KABUPATEN TANAH DATAR**

Agnesia Ananta^{1(a)} , Syamsir^{2(b)}

¹*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

²*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

^{a)}*agnesiaananta99@yahoo.com*, ^{b)}*syamsirsaili@yahoo.com*

ABSTRACT – *The purpose of this study was to determine the effect of income and tenure on the performance of the nagari apparatus in nagari financial management in Tanah Datar District. The background of this study is that there are indications that nagari financial management is still poor in Tanah Datar District. This study uses quantitative research methods. The population of this study is that all nagari apparatus in Tanah Datar District numbered 600 people consisting of walinagari, nagari secretary, nagari treasurer and five nagari affairs heads. The sample in this study consisted of 248 respondents who were determined using the Slovin formula and through the Multi Stage Random Sampling technique. Data collected through questionnaires. The data of this study were analyzed by Anova Test. The results in this study show that there is no significant difference in the performance of nagari financial management based on income and years of service in Tanah Datar District.*

Keywords : *Income, Working period, Performance, nagari financial management*

Corresponding author. Email. *agnesiaananta99@yahoo.com, syamsirsaili@yahoo.com*

How to cite this article. Ananta, A & Syamsir. (2019). Pengaruh Pendapatan dan Masa Kerja terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 1 (3), Hal. 32-41.

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)

Copyright©2019. Published by Pusat Kajian-Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (PK-P2M) FIS UNP Padang

PENDAHULUAN

Nagari (desa) merupakan institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Ini terlihat dalam kewenangan penuh yang didapatkan oleh desa untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan sendiri. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara yaitu dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam kedua UU tersebut dijelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini ditegaskan dengan diharuskannya desa menyusun APBD desa seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan itu, maka secara hukum pemerintah desa/nagari berkewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada pemerintah dan masyarakat.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, desa atau nagari diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengurus jalannya pemerintahan desa atau nagari serta dalam hal pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Berdasarkan UU ini, desa diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur secara mandiri urusan rumah tangganya, dimulai dari adanya kejelasan dan kepastian hukum atas desa, melestarikan adat budaya dan tradisi desa, mendorong partisipasi untuk mengembangkan potensi dan aset desa, menjadikan pemerintahan desa yang efektif, efisien, profesional, terbuka dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat desa sebagai tujuan dari pembangunan.

Keistimewaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dibandingkan Undang-Undang terdahulu yang mengatur tentang desa, yang mana salah satunya adalah tiap desa atau nagari akan mendapatkan kucuran dana dari APBN (alokasi dana desa) yang berkisar 1,4 Milyar/tahun/desa. Namun besaran dana yang diterima tiap desa berbeda beda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Bila kepala desa/ walinagari maupun aparaturnya tidak menguasai akuntansi atau pengelolaan keuangan, sangat rawan terjadinya korupsi tingkat desa. Kepala desa atau wali nagari maupun aparaturnya sampai sekarang dalam pembukuan masih sangat sederhana. Mereka hanya mencatat transaksi yang terjadi setiap harinya secara manual dimana setiap kas yang masuk mereka catat sebagai pendapatan dan setiap kas yang keluar dicatat sebagai pengeluaran. Sehingga internal kontrol terhadap pengelolaan keuangan nagari ini sangat lemah sekali (Sukartini: 2016).

Dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, kinerja aparatur nagari ditunjang dengan adanya Anggaran Pemerintahan Nagari (APBN) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat digunakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu kinerja aparatur nagari pada pemerintahan nagari harus dievaluasi dan lebih ditingkatkan secara terus menerus. Proses penilaian kinerja aparatur nagari tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab para pemimpin, motivasi kerja yang ada, serta pelatihan aparatur nagari di instansi tersebut. Peningkatan kinerja aparatur nagari senantiasa dilakukan agar dapat mencapai sasaran pelayanan prima bagi masyarakat, yaitu terciptanya pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah yang sesuai dengan standar, serta dapat menciptakan penilaian positif bagi pemerintahan itu sendiri (Mardika, 2018).

Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar No. 11 Tahun 2014 dikatakan bahwa

pengelolaan keuangan nagari diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikatakan bahwa setiap belanja daerah yang diatas namakan nagari harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pengelolaan keuangan nagari akan dikelola dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang terhitung dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 30 desember. Dalam Peraturan Bupati tersebut dapat dilihat bahwa pengelolan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar dikelola dengan disiplin, transparan dan setiap pengeluaran yang terjadi harus memiliki bukti yang jelas. Namun pada kenyataannya masih dapat ditemukan pelanggaran atau penyimpangan mengenai pengelolaan keuangan nagari di kabupaten Tanah Datar dalam pengimplementasinya.

Dari berbagai fakta yang ditemukan mengenai pengelolaan keuangan nagari tersebut maka di lapangan masih banyak ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari, dari berbagai permasalahan yang terjadi tersebut banyak hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya permasalahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah mengenai pendapatan, karena pendapatan akan sangat mempengaruhi terhadap bagaimana kinerja pegawai terutama aparatur pengelolaan keuangan nagari dalam mengelola keuangan nagari.

Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah mengenai pemberian gaji dan tunjangan kesejahteraan kepada pegawai. Dengan adanya pemberian gaji, maka hubungan pegawai dengan instansi akan dapat terjalin dengan baik, sehingga pegawai berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja karena merasa dihargai oleh instansi tersebut. Pemberian gaji tersebut akan berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai, hal ini disebabkan uang masih merupakan motivator yang kuat bagi pegawai, maka dari itu setiap instansi perlu

memperhatikan mengenai gaji dan tunjangan kesejahteraan untuk para pegawainya. (Indriyani, 2014).

Selain itu melalui wawancara dengan Sekretaris di nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum mengatakan bahwa “untuk masalah pendapatan kita sebagai aparatur nagari disini memang perlu ditingkatkan. Apalagi saya yang sebagai sekretaris hanya mendapatkan gaji pokok kurang lebih Rp. 1.500.000., dan itu sangat jauh dari cukup untuk kehidupan kita setiap bulannya. Karena di dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab kita itu sangat berbanding jauh. Apalagi dalam hal pengurusan dana desa yang lebih kurang 1 milyar per tahun, dan memiliki resiko dan tanggung jawab yang sangat besar.

Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai masa kerja, dimana masa kerja adalah faktor yang berkaitan langsung dengan produktifitas kerja, usia dan masa kerja yang dirasakan oleh para karyawan dapat menurunkan produktifitas ataupun meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas seseorang dalam bekerja adalah jangka waktu dalam bekerja, Semakin lama masa kerja seseorang tenaga kerja seharusnya keterampilan dan kemampuan melakukan pekerjaan semakin meningkat. Pengalaman seseorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan secara terus-menerus mampu meningkatkan kedewasaan teknisnya. Masa kerja ialah tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan. Ada beberapa hal yang menentukan berpengalaman atau tidaknya seseorang karyawan dan sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu lama waktu/ usia kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan dan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan (Aprilyanti, 2017).

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan sekretaris nagari Sumpur Kecamatan Lima Kaum. Mengatakan

bahwa “Masa kerja merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi kinerja aparatur nagari terutama yang berada di daerahnya. Pemilihan aparatur nagari pada saat terpilihnya wali nagari baru, tidak semuanya diganti. Ada diantara aparatur Nagari tersebut yang diganti, namun masih ada yang dipertahankan karena berbagai faktor. Akan tetapi pada selama dua periode masa jabatannya, dapat dilihat bahwa masa kerja sangat menentukan bagaimana kinerjanya. Aparatur nagari yang memiliki masa kerja lebih lama memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan aparatur yang baru masih kurang pengalaman terutama dalam hal pengelolaan keuangan di nagari. Akan tetapi tidak semata mata tentang berapa lama masa kerja yang dimiliki, faktor usia juga sangat mempengaruhi. Aparatur dengan masa kerja yang sudah lama, dengan pengalaman yang banyak terkadang juga belum tentu memiliki kinerja yang bagus, jika mereka sudah tidak lagi muda dan sangat sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Misalnya saja dalam hal pengelolaan keuangan nagari yang pelaporan pelaporannya sudah elektronik.

Dari penjabaran masalah yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan dan masa kerja terhadap kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan inti sari dari hasil penelitian skripsi dan merupakan bagian dari penelitian payung yang dilakukan oleh Syamsir (2017) dengan judul *Model Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar (2) untuk mengetahui pengaruh masa kerja terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Kinerja merupakan perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna serta untuk kerja dari suatu organisasi/individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Merujuk dari kata kinerja diatas maka dapat dijelaskan tentang pengertian kinerja aparatur, dimana kinerja aparatur merupakan dari hasil kerja pegawai aparatur, dimana aparatur itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti orang yang bekerja pada pemerintahan atau melakukan sebuah kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggungjawab nya dengan hasil seperti yang di harapkan. Menurut Ponijan (2012) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja. Kemudian Edison (2016) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari sebuah proses yang merujuk dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu kinerja merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, dimana kinerja merupakan capaian/hasil dari apa yang telah dikerjakan dan direncanakan sebelumnya, dan merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan sebuah tanggung jawab yang telah dilimpahkan, agar mendapat hasil yang diinginkan.

Pendapatan

Suroto (2000) mengatakan pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang ataupun berupa barang yang berasal dari pihak lain yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indriyani(2014) mengatakan yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah dengan pemberian gaji, karena uang termasuk motivator yang kuat bagi pegawai, maka setiap instansi perlu memperhatikan mengenai gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan pegawainya. Winarni & Utomo(2013) gaji dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk bekerja keras, dengan demikian bahwa untuk menciptakan kinerja yang optimal dalam suatu instansi termasuk didalamnya dibutuhkan suatu imbalan yang pantas dalam bentuk gaji bagi setiap pegawai dikantor tersebut.

Masa Kerja

Masa kerja adalah faktor yang berhubungan langsung dengan produktifitas kerja, usia dan masa kerja yang dirasakan oleh pegawai dapat menurunkan produktifitas ataupun meningkatkan produktifitas kerja pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas pegawai dalam bekerja diantaranya lamanya waktu bekerja. Semakin lama masa kerja seseorang tenaga kerja seharusnya keterampilan dan kemampuan melakukan pekerjaan semakin meningkat. Pengalaman seseorang melaksanakan pekerjaan secara terus-menerus akan meningkatkan kedewasaan teknisnya.

Septiana(2015), Oktaviani memberikan penjelasan bahwa masa kerja adalah lamanya seseorang karyawan memberikan tenaganya pada instansi tertentu. Sejauh mana karyawan mampu memperoleh hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kemampuan, kecakapan dan keterampilan tertentu, agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Masa kerja adalah pengalaman seseorang yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Andi Mapiere memberikan penjelasan bahwa kenaikan jabatan dalam pekerjaan akan dialami oleh seseorang apabila telah menjalani proses belajar dan berpengalaman dan diharapkan karyawan memiliki sikap kerja yang kearah

positif, memiliki kecakapan (pengetahuan) kerja yang bertambah baik serta memiliki ketrampilan kerja yang bertambah dalam kualitas dan kuantitasnya.

Muamarizal, Samsir, & Marzolina(2015) mengatakan yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah tergantung jangka lama atau tidak nya masa kerja pegawai, misalnya semakin lama seseorang bekerja, maka semakin tinggi pula produktifitasnya karena semakin berpengalaman dan tingkat penguasaan akan pekerjaannya pun semakin fasih. Dengan pengalaman seseorang akan mampu mengembangkan kemampuannya sehingga diharapkan ia akan merasa betah untuk tetap bertahan. Susilawati (2012) pegawai yang memiliki masa kerja yang lama akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan baik, sehingga kinerja pegawai dapat terealisasi dengan baik.

Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Peraturan mengenai pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia diatur dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai pengganti peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 29 dituliskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa maupun aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 10 yang mana menjelaskan mengenai keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Permendagri No.20 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat 1, dijelaskan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa

merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa. Dalam pengelolaan keuangan nagari atau yang menjadi tolak ukur keberhasilannya adalah bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan atau mengelola keuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. Dinyatakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisa data dan kesimpulan data hingga penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Penelitian dilaksanakan di beberapa kenagarian di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 600 orang responden, dengan jumlah nagari sebanyak 75 nagari. Responden dalam penelitian ini terdiri dari semua aparatur nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari

walinagari, sekretaris nagari, bendahara nagari, dan 5 kaur nagari (pemerintahan, ekonomi, umum, pembangunan dan kesejahteraan rakyat). Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 248 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, dan teknik penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Multi Stage Random Sampling*. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan pengukuran skala likert dengan empat opsi, diantaranya yaitu : Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan Uji Anova.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, bahwa penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ada sebelumnya, yaitu : apakah terdapat pengaruh pendapatan dan masa kerja terhadap kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat hasil penelitian seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Anova Pengaruh Pendapatan Terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari

ANOVA					
Pengelolaan Keuangan Nagari					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.029	2	.015	.063	.939
Within Groups	56.935	245	.232		
Total	56.964	247			

Sumber: Data olahan SPSS 2019

Descriptives								
Pengelolaan Keuangan Nagari								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Tidak Mencukupi	75	3.25	.496	.057	3.14	3.37	2	4
Kurang Mencukupi	144	3.23	.484	.040	3.15	3.31	2	4
Mencukupi	29	3.24	.435	.081	3.08	3.41	3	4
Total	248	3.24	.480	.030	3.18	3.30	2	4

Sumber: Data olahan SPSS 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dengan angka signifikan 0,939. Kemudian pada tabel 2 jika dilihat secara satu persatu rata rata hitung kinerja aparatur berdasarkan pendapatan berbeda-beda. Rata rata pengelolaan keuangan nagari pendapatan tidak mencukupi menunjukkan angka 3,25, pendapatan kurang mencukupi 3,23, pendapatan mencukupi 3,24. Akan tetapi jika dilihat secara satu persatu masing-masing pendapatan aparatur memiliki kinerja yang berbeda. Aparatur yang pendapatan tidak mencukupi memiliki rata-rata pengelolaan keuangan nagari dengan angka 3,25, pendapatan kurang mencukupi 3,23, pendapatan mencukupi 3,24. Dari rata-rata pengelolaan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja aparatur yang tidak mencukupi adalah yang paling tinggi, diikuti dengan kinerja aparatur mencukupi. Kinerja yang paling rendah

adalah aparatur yang pendapatan kurang mencukupi.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian mengenai pengaruh pendapatan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan akan menentukan bagaimana seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Salah satunya seperti penelitian yang dilakukan oleh Marianus Subianto(2016) pendapatan akan menentukan bagaimana individu dalam melakukan pekerjaan.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh masa kerja terhadap kinerja aparatur nagari dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Anova Pengaruh Pendapatan Terhadap Kinerja Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari

ANOVA					
Pengelolaan Keuangan Nagari					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.531	3	.177	.765	.515
Within Groups	56.433	244	.231		
Total	56.964	247			

Sumber: Data olahan SPSS 2019

Descriptives								
Pengelolaan Keuangan Nagari 1								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean			
					Lower Bound	Upper Bound	Minimum	Maximum
Kurang dari 5 tahun	122	3.23	.477	.043	3.14	3.32	2	4
6-10 tahun	74	3.27	.531	.062	3.15	3.39	2	4
11-15 tahun	34	3.15	.359	.062	3.02	3.27	3	4
16-25 tahun	18	3.33	.485	.114	3.09	3.57	3	4
Total	248	3.24	.480	.030	3.18	3.30	2	4

Sumber: Data olahan SPSS 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa masa kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dengan angka signifikan 0,515. Kemudian pada tabel 4 jika dilihat secara satu persatu rata-rata hitungan kinerja aparatur berdasarkan masa kerja berbeda-beda. Rata-rata pengelolaan keuangan nagari masa kerja kurang dari 5 tahun menunjukkan angka 3,23, masa kerja 6-10 tahun menunjukkan angka 3,27, masa kerja 11-15 tahun menunjukkan angka 3,15, masa kerja 16-25 tahun menunjukkan angka 3,33. Akan tetapi jika dilihat secara satu persatu masing-masing masa kerja aparatur memiliki kinerja yang berbeda. Dari rata-rata pengelolaan keuangan nagari tersebut dapat dilihat bahwa kinerja aparatur 16-25 tahun adalah yang yang paling tinggi, diikuti dengan 6-10 tahun, kemudian kurang dari 5 tahun, kinerja yang paling rendah adalah aparatur 11-15 tahun.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susilawati (2012), dari hasil penelitian didapat hasil bahwa variabel masa kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan dan masa kerja terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari untuk variabel pendapatan yaitu tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap kinerja aparatur dalam

pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Begitupun juga dengan masa kerja bahwasanya tidak terdapat pengaruh masa kerja terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian mengenai pengaruh pendapatan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan akan menentukan bagaimana seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Salah satunya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Marianus Subianto, 2016), pendapatan akan menentukan bagaimana individu dalam melakukan pekerjaan. Kemudian untuk pengaruh pendapatan terhadap kinerja aparatur didapatkan hasil bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dengan angka signifikan 0,939. Akan tetapi jika dilihat secara satu persatu dari rata-rata pendapatan pengelolaan keuangan nagari yang paling tinggi adalah aparatur pendapatan tidak mencukupi, diikuti dengan aparatur pendapatan mencukupi. Dan Pendapatan paling rendah adalah aparatur pendapatan kurang mencukupi.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Kemudian untuk pengaruh masa kerja terhadap kinerja aparatur didapatkan hasil bahwa masa kerja tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja dengan angka signifikansi 0,515. Akan tetapi jika dilihat secara satu persatu Dari rata-rata masa kerja pengelolaan keuangan nagari berdasarkan masa kerja dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan yang paling tinggi adalah aparatur dengan masa kerja 16 sampai 25 tahun, diikuti dengan aparatur dengan masa kerja 6 sampai 10 tahun, selanjutnya aparatur dengan masa kerja 6 sampai 10 tahun, dan diikuti dengan masa kerja kurang dari 5 tahun. Sedangkan kinerja pengelolaan yang paling rendah adalah aparatur dengan masa kerja 11 sampai 15 tahun.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masa kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susilawati (2012), dari hasil penelitian didapat hasil bahwa variabel masa kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan memiliki signifikan 0,939 dan masa kerja memiliki nilai signifikan 0,515. Akan tetapi jika dilihat secara satu persatu bahwasanya kinerja aparatur tidak mencukupi memiliki kinerja paling tinggi, diikuti oleh aparatur mencukupi, kemudian yang paling rendah adalah aparatur dengan pendapatan kurang mencukupi.

Sedangkan untuk perbedaan masa kerja aparatur 16-25 tahun memiliki kinerja paling tinggi, diikuti oleh aparatur 6-10 tahun, kemudian aparatur kurang dari 5 tahun, dan kinerja yang paling rendah adalah aparatur 11-15 tahun. Hal ini berarti pendapatan maupun masa kerja sama-sama tidak memiliki perbedaan secara signifikan terhadap kinerja aparatur dalam

pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 di terima dan H_a ditolak.

Berlatar belakang hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran, diantaranya :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan masa kerja memberikan pengaruh yang tidak signifikan bagi kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi dilihat secara sendiri-sendiri tingkat pendapatan aparatur nagari yang paling tinggi adalah aparatur tidak mencukupi, sehingga pemerintah harus meningkatkan pendapatan aparatur nagari, sehingga dapat menunjang kinerja agar lebih baik lagi.
2. Penelitian yang dilakukan masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, diharapkan pada peneliti berikutnya untuk mendalami melakukan penelitian ini dengan melibatkan berbagai variabel lain yang mungkin juga dapat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aprilyanti, S. (2017). Pengaruh Usia dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus: PT. OASIS Water International Cabang Palembang). *Jurnal Sistem Dan Manajemen Industri Vol, 15*(January), 1–6. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15858.61129>.
- Indriyani, A. (2014). Analisis Pengaruh Gaji Dan Tunjangan Kesejahteraan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Operation Department Pt. Export Leaf Indonesia. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta, 12*(01), 41–56.

- Mardika, N. H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Nagari, *3*(2), 182–195.
- Marianus Subianto. (2016). Pengaruh Gaji Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt . Serba Mulia Auto. *EJournal Administrasi Bisnis*, *4*, 698–712.
- Muamarizal, S., Samsir, & Marzolina. (2015). Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan Karir Karyawan pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru. *JOM FEKON*, *2*(1), 1–21.
- Ponijan. (2012). Penilaian kinerja dan komitmen dalam etika pemerintahan. *Widya*, *320*, 35.
- Septiana, V. A. (2015). Pengaruh Faktor Masa Kerja, Kompensasi Dan Pendidikan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Dengan Produktivitas Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Unpand*, *17*. Retrieved from <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/237>
- Winarni, & Utomo, H. (2013). Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kota Salatiga Melalui Variabel Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, *6*(11), 48–71.
- Murtiono, Y. 2016. Modul Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta:Infest.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
- Peraturan Menteri Dalam Negri No 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Syamsir. 2017. Model Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Laporan Penelitian. Padang. Universitas Negeri Padang .